

**LAPORAN  
KERJA PRAKTEK**

**IDENTIFIKASI ISU DAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN  
KARANGGEDE BERDASARKAN RDTR WP KECAMATAN  
KARANGGEDE TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN  
INOVASI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun Oleh:

1. Saras Palupining Tiyas (21/476899/GE/09559)
2. Vitta Annisa Faradilla (21/473183/GE/09470)

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN WILAYAH  
DEPARTEMEN GEOGRAFI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS GEOGRAFI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan kerja praktek. Kerja praktek ini menjadi salah satu mata kuliah yang ditawarkan dalam Program Studi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Kerja praktek merupakan mata kuliah yang dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai dunia kerja di bidang pembangunan dan pengembangan wilayah. Selain itu, kerja praktek menjadi wadah dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Geografi.

Selama proses pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktek ini, terdapat tantangan dan kendala yang telah dihadapi. Hal ini menjadikan pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja praktek tidak terlepas dari pihak-pihak yang memberikan dukungan serta bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk kelancaran kegiatan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. M. Syawalludin, AP, M.Si. selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali
2. Kunawi, S.T. selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali
3. Budi Indratno, S.T., selaku Pembimbing Lapangan Kerja Praktek Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali Kabupaten Boyolali
4. Dr. Erlis Saputra, S.Si., M.Si. selaku Kepala Departemen Geografi Pembangunan
5. Dr. Geog. Dodi Widiyanto, S.Si., M.RegDev, selaku Kepala Program Studi Pembangunan Wilayah
6. Mohammad Isnaini Sadali, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing kerja praktek
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Selama kegiatan magang dan proses penyusunan laporan kerja praktik, penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki laporan ini. Penyusun berharap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, khususnya kepada pembaca.

Boyolali, 14 Maret 2025

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   | i   |
| KATA PENGANTAR.....  | ii  |
| DAFTAR ISI.....  | iii |
| DAFTAR GAMBAR.....   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 1   |
| 1.1    Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2    Tujuan.....   | 2   |
| BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH.....  | 3   |
| BAB III ISU DAN PERMASALAHAN.....  | 6   |
| 3.1    Kebakaran Pasar Karanggede.....   | 6   |
| 3.2    TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Desa Sendang Belum Berfungsi Secara Optimal..... | 6   |
| 3.3    Terminal Tipe C Tidak Berfungsi Optimal.....  | 7   |
| 3.4    Rawan Bencana Banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol.....                                 | 8   |
| 3.5    Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri).....   | 9   |
| BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN RDTR KECAMATAN KARANGGEDE.....  | 10  |
| 4.1    Rekomendasi terkait Kebakaran Pasar Karanggede.....   | 10  |
| 4.2    Rekomendasi terkait di Desa Sendang.....  | 11  |
| 4.3    Rekomendasi terkait Terminal Tipe C Karanggede.....   | 13  |
| 4.4    Rekomendasi terkait Rawan Bencana Banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol.....             | 15  |
| 4.5    Rekomendasi terkait Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri).....                                   | 16  |
| BAB V PENUTUP.....   | 19  |
| 5.1    Kesimpulan.....   | 19  |
| 5.2    Saran.....  | 20  |
| DAFTAR PUSTAKA.....  | 21  |

## DAFTAR GAMBAR

|  |   |
|--|---|
| Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Karanggede ..... | 3 |
|--|---|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan tata ruang dan wilayah merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan secara optimal dan penataan ruang atau lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta atau masyarakat yang ingin dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (Wahid, 2014). Secara umum, perencanaan struktur ruang wilayah dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang berfungsi sebagai panduan makro untuk pengelolaan ruang di tingkat kabupaten/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 diartikan sebagai rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RTRW merupakan dokumen rencana yang menentukan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis pada suatu wilayah (Mokodongan et al., 2019).

RTRW bersifat makro dan memiliki jangka waktu penerapan yang panjang yaitu selama 20 tahun, sehingga untuk memastikan pelaksanaan tata ruang yang lebih efektif, RTRW memerlukan dukungan dari perencanaan yang lebih rinci dan spesifik. Dalam hal ini, keterbatasan ruang yang tersedia sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan yang mana dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang dirancang oleh suatu daerah (Endasmoro & Akliyah, 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah perencanaan detail yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan ruang dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan hasil dari perencanaan yang menggambarkan struktur dan pola penggunaan ruang sebagai kebijakan daerah dalam pengelolaan tata ruang (Haurissa et al., 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) didefinisikan sebagai rencana yang menggambarkan secara terperinci tata ruang wilayah kabupaten/kota yang disertai dengan peraturan zonasi untuk wilayah tersebut. Dokumen ini berperan strategis dalam mendukung pembangunan kabupaten/kota, khususnya di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia. RDTR berfungsi sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, mengingat kebutuhan ruang dan infrastruktur

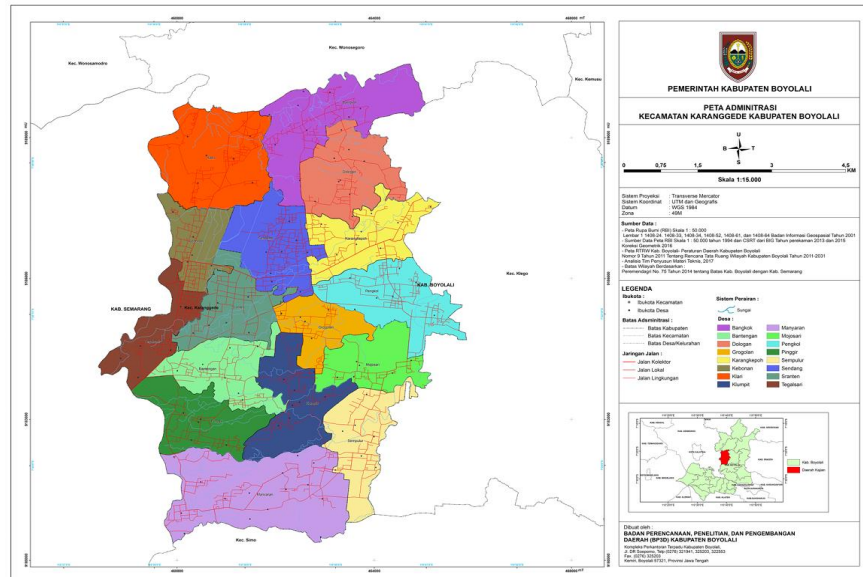
semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (Pratama et al., 2015). RDTR juga berperan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengurusan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan permukiman, pendirian tempat usaha, hingga pemanfaatan ruang untuk kegiatan tertentu yang bersifat strategis (Hamid, 2023).

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari “Identifikasi Isu dan Permasalahan di Kecamatan Karanggede Berdasarkan RDTR WP Kecamatan Karanggede Tahun Anggaran 2025” adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi isu dan permasalahan strategis terkait tata ruang di Kecamatan Karanggede
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait isu dan permasalahan tata ruang di Kecamatan Karanggede

## BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH



*Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Karanggede*

Kecamatan Karanggede merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Boyolali dengan luas wilayah mencapai 4.678,28 ha. Kecamatan Karanggede terdiri dari 16 desa yang meliputi Desa Bangkok, Desa Bantengan, Desa Dologan, Desa Grogolan, Desa Karangkepo, Desa Kebonan, Desa Klari, Desa Klumpit, Desa Manyaran, Desa Mojosari, Desa Pengkol, Desa Pinggir, Desa Sempulur, Desa Sendang, Desa Sranten, dan Desa Tegalsari. Secara astronomis, kecamatan ini berada di antara  $110^{\circ}37'46'' - 110^{\circ}41'21.5''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}22'10.7'' - 7^{\circ}22'21.9''$  Lintang Selatan. Secara administratif, Kecamatan Karanggede berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonorego di sebelah utara, Kecamatan Klego di sebelah timur, Kecamatan Simo di sebelah selatan, serta Kabupaten Semarang di sebelah barat. Topografi Kecamatan Karanggede bervariasi dengan ketinggian yang relatif rendah hingga sedang, sehingga wilayah ini memiliki kondisi lahan yang cukup beragam dalam mendukung berbagai aktivitas. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali, kelerengan di Kecamatan Karanggede terbagi ke dalam lima kategori, dengan mayoritas wilayah memiliki kemiringan 2-15%, yang dikategorikan sebagai daerah agak landai.

Kecamatan Karanggede memiliki beragam jenis tanah yang mendukung aktivitas pertanian dan penggunaan lahan lainnya. Jenis tanah yang terdapat di wilayah ini antara lain tanah gleisol, tanah kambisol, tanah litosol, serta tanah mediteran halpik. Keberagaman jenis tanah ini memberikan karakteristik tersendiri terhadap kesuburan lahan serta kecocokan untuk berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Selain

kondisi tanah yang beragam, Kecamatan Karanggede juga dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Kali Serang dan Kali Braholo, yang berperan penting dalam sistem pengairan pertanian di wilayah ini. Kali Serang terletak di sebelah barat dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber irigasi untuk persawahan di beberapa desa, yaitu Tegalsari, Bantengan, Klumpit, Kebonan, Sranten, Grogolan, Sendang, Mojosari, Pengkol, dan Karangkepoh. Sementara itu, Kali Braholo mengalir di bagian selatan Kecamatan Karanggede dan berbelok ke utara di perbatasan sebelah timur. Air dari Kali Braholo dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Manyaran, Sempulur, Klumpit, Mojosari, dan Pengkol sebagai sumber pengairan untuk sawah mereka. Dari aspek klimatologi, Kecamatan Karanggede memiliki curah hujan tahunan yang bervariasi, berkisar antara 2.000–2.500 mm hingga 2.500–3.000 mm per tahun. Tingginya curah hujan pada musim penghujan dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir di desa-desa yang berada di sekitar aliran sungai.

Pada tahun 2023, Kecamatan Karanggede memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.259 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 10,32 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Manyaran, yang mencatat total 4.662 jiwa. Sementara itu, desa dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Desa Tegalsari, dengan tingkat kepadatan mencapai 15,21 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kecamatan Karanggede didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), yang mencapai 67% dari total penduduk, atau sekitar 32.503 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, baik di bidang pertanian, industri kecil, maupun sektor jasa. Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kecamatan Karanggede pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai wiraswasta, yang mencapai 9,43% atau sekitar 3.603 jiwa. Profesi terbanyak kedua adalah buruh tani atau pekerja di sektor perkebunan, yang mencapai 6,67% atau sekitar 3.231 jiwa. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan lahan di Kecamatan Karanggede yang masih didominasi oleh lahan pertanian, terutama persawahan.

Jika dilihat dari struktur mata pencaharian penduduk, di mana sekitar 6,67% penduduk bekerja sebagai buruh tani, dapat disimpulkan bahwa pertanian merupakan salah satu potensi utama Kecamatan Karanggede. Besarnya potensi pertanian didukung kondisi topografi yang relatif datar dan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga Kecamatan Karanggede didominasi oleh lahan sawah, yang mencakup area seluas 1.811 ha. Dalam hal ini, produksi tanaman pangan di Kecamatan Karanggede pada tahun 2020 didominasi oleh komoditas ubi kayu, dengan total produksi mencapai 3.038,70 ton. Sebaliknya, komoditas dengan produksi terendah adalah kedelai, yang hanya mencapai 35,4 ton. Selain tanaman pangan, buah-buahan juga menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kecamatan Karanggede. Beberapa jenis buah yang



banyak dibudidayakan di wilayah ini antara lain mangga, semangka, durian, pepaya, alpukat, pisang, dan rambutan. Selain sektor pertanian, Kecamatan Karanggede juga memiliki potensi di bidang peternakan. Beberapa komoditas peternakan unggulan yang berkembang di wilayah ini antara lain sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, kelinci, unggas, serta produksi telur. Potensi ini menunjukkan bahwa sektor peternakan dapat menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Kecamatan Karanggede memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial ekonomi. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait ketimpangan persebaran fasilitas pelayanan umum, yang mengakibatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar masih belum merata di seluruh wilayah kecamatan. Dalam bidang kesehatan, Kecamatan Karanggede hanya memiliki satu rumah sakit, yang berlokasi di Desa Kebonan, serta dua poliklinik yang tersebar di Desa Tegalsari dan Desa Kebonan. Keberadaan fasilitas kesehatan ini masih terpusat di beberapa desa tertentu, sehingga masyarakat yang tinggal di desa-desa lain perlu menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan layanan medis yang lebih lengkap. Dalam bidang perekonomian, Kecamatan Karanggede hanya memiliki satu pasar umum, yaitu Pasar Karanggede, yang terletak di Desa Kebonan. Pasar ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Boyolali dan berfungsi sebagai pusat perdagangan utama di Kecamatan Karanggede. Tidak hanya melayani masyarakat setempat, Pasar Karanggede juga menjadi tujuan perdagangan bagi pembeli dari kecamatan-kecamatan lain, seperti Wonosegoro dan Klego di Kabupaten Boyolali, serta Suruh dan Susukan di Kabupaten Semarang.

## **BAB III**

### **ISU DAN PERMASALAHAN**

#### **3.1 Kebakaran Pasar Karanggede**

Pasar Karanggede merupakan satu-satunya pasar umum di Kecamatan Karanggede yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Boyolali. Pasar ini berlokasi di Desa Kebonan dan hanya beroperasi pada hari pasaran Wage dan Legi, sesuai dengan sistem penanggalan Jawa. Selama beberapa dekade, Pasar Karanggede telah menjadi pusat utama kegiatan perdagangan dan jasa bagi masyarakat setempat serta wilayah sekitarnya. Tidak hanya melayani pembeli dari Kecamatan Karanggede, pasar ini juga menjadi destinasi perdagangan bagi masyarakat dari Kecamatan Wonosegoro dan Klego di Kabupaten Boyolali, serta Kecamatan Suruh dan Susukan di Kabupaten Semarang. Selain itu, banyak pedagang yang berjualan di pasar ini berasal dari luar Kecamatan Karanggede, menunjukkan bahwa pasar ini memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lintas wilayah.

Pasar Karanggede yang merupakan sebuah pusat ekonomi lokal pada hari Minggu, 3 November 2024, Pasar Karanggede mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan sebagian besar kios dan los pedagang. Kebakaran ini berdampak pada area seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup>, menyebabkan puluhan kios dan ratusan los dasaran hangus terbakar. Tidak hanya kios milik pedagang, tetapi juga kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Karanggede yang berada di lantai 2 ikut terdampak dalam insiden tersebut. Berdasarkan kesaksian warga, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu freezer di salah satu los pasar, yang kemudian memicu api dan menyebar dengan cepat ke bagian lain pasar. Akibat dari peristiwa ini, kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar, yang meliputi kerusakan fisik bangunan pasar serta hilangnya barang dagangan milik para pedagang.

#### **3.2 TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Desa Sendang Belum Berfungsi Secara Optimal**

TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Sendang terletak di di Dusun Klimas, Desa Sendang. TPST ini memiliki ukuran 10 meter x 20 meter yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan, yakni sistem pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Namun, TPST ini belum berfungsi secara baik karena tidak terdapat aktivitas pengumpulan maupun pengolahan sampah. Meskipun demikian, kondisi fisik bangunan masih terjaga dengan baik. Selain itu, TPST Sendang juga dilengkapi dengan bangunan kantor sebagai administrasi serta wadah komunal yang seharusnya digunakan untuk menampung dan memilah sampah sebelum diolah lebih lanjut. Namun, ketidakbergunaan fasilitas ini

menunjukkan adanya potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

TPST Sendang memiliki berbagai jenis mesin pengolah sampah yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan limbah secara lebih efektif. Beberapa mesin yang tersedia antara lain yaitu *belt conveyor* untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, mesin pencacah sampah yang berfungsi untuk menghancurkan sampah menjadi ukuran yang lebih kecil, serta mesin pengayak yang digunakan untuk menyaring dan memisahkan material sampah sesuai dengan tingkat kehalusannya. Semua peralatan tersebut masih dalam kondisi yang baik, tidak mengalami kerusakan, serta tidak menunjukkan tanda-tanda korosi atau karat. Selain mesin pengolah sampah, di TPST Sendang terdapat 8 unit bin pengomposan yang masih dalam kondisi layak. TPST ini juga memiliki bak penyimpanan yang difungsikan untuk menampung hasil pemilahan sampah sebelum dilakukan proses lebih lanjut. Keberadaan berbagai fasilitas ini menunjukkan bahwa TPST Sendang memiliki potensi untuk menjadi pusat pengolahan sampah yang lebih optimal jika dioperasikan dengan baik.

Ketidaktifan TPST Sendang menunjukkan bahwa fasilitas ini belum berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Tidak adanya aktivitas yang terlihat di lokasi mengindikasikan bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab atas operasional TPS 3R tidak berjalan dengan baik. Selain itu, aspek pembiayaan yang seharusnya mendukung keberlangsungan operasional juga tidak dapat dipastikan karena TPST tidak aktif. Hal yang sama berlaku pada aspek partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan warga dalam proses pengelolaan sampah tidak teridentifikasi akibat tidak berjalannya sistem yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPST Sendang belum mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah di Desa Sendang.

### **3.3 Terminal Tipe C Tidak Berfungsi Optimal**

Terminal Tipe C di Kecamatan Karanggede berlokasi di Desa Kebonan dan berperan penting dalam mendukung sistem transportasi di wilayah tersebut. Terminal ini berfungsi sebagai pusat layanan angkutan umum yang menghubungkan berbagai rute perjalanan, baik dalam maupun luar kecamatan. Selain melayani kebutuhan transportasi bagi penumpang, terminal ini juga berperan dalam mendukung distribusi logistik. Berbagai layanan pengiriman barang tersedia di terminal ini, termasuk pengiriman paket, kargo, serta pengangkutan kendaraan seperti mobil dan jenis muatan lainnya. Dengan adanya fasilitas ini, terminal dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dan distribusi barang secara lebih efisien.

Terminal Tipe C di Kecamatan Karanggede mengalami permasalahan dalam operasionalnya sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Kondisi terminal terlihat kurang terawat dengan fasilitas yang tidak

mendapatkan pemeliharaan secara optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi, baik bagi penumpang maupun pihak yang terlibat dalam layanan logistik. Fasilitas yang kurang terawat dapat berpotensi menghambat efektivitas terminal sebagai pusat transportasi dan distribusi barang di wilayah Karanggede.

Terminal Tipe C di Kecamatan Karanggede ini tidak berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang kurang terawat. Meskipun lokasinya cukup strategis karena berada di dekat Pasar Karanggede, terminal ini tidak dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pusat transportasi umum. Akibatnya, aktivitas di terminal menjadi sepi dengan minimnya kendaraan angkutan umum maupun bus yang beroperasi. Sebaliknya, area terminal lebih sering dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi bagi masyarakat yang hendak berbelanja ke Pasar Karanggede. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan terminal belum memberikan manfaat yang maksimal bagi sistem transportasi di wilayah Karanggede.

#### **3.4 Rawan Bencana Banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol**

Kecamatan Karanggede memiliki risiko banjir karena dipengaruhi oleh kondisi topografi, geologi, jenis tanah, dan klimatologi. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah atau tingkat kemiringan yang landai sehingga air cenderung menggenang dan sulit mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Selain itu, jenis tanah yang mendominasi di Kecamatan Karanggede memiliki daya serap air yang rendah sehingga berpotensi menyebabkan banjir saat hujan deras. Kondisi klimatologi, seperti intensitas curah hujan yang tinggi pada periode tertentu meningkatkan risiko terjadinya banjir. Apabila terjadi hujan lebat, sungai-sungai dapat meluap dan tergenangnya permukiman serta lahan pertanian.

Berdasarkan RDTR Kecamatan Karanggede, Desa Mojosari merupakan desa dengan rawan bencana banjir kelas tinggi paling luas yakni 126,50 ha, kemudian diikuti oleh Desa Pengkol seluas 71,52 ha. Kedua desa ini memiliki topografi yang mencekung dengan sistem drainase serta serapan air yang kurang memadai. Pada tahun 2021, kedua desa tersebut mengalami bencana banjir bandang yang disebabkan oleh meluapnya air sungai ke kawasan permukiman akibat tingginya intensitas curah hujan. Hujan deras yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan volume air di Sungai Braholo meningkat secara drastis hingga melampaui kapasitas daya tampungnya. Beberapa rumah warga rusak parah hingga hanyut terbawa oleh bencana air yang terjadi secara mendadak. Hujan deras yang terjadi juga mengakibatkan banjir di area persawahan Desa Pengkol dan Mojosari. Tinggi air mencapai 1,5 meter yang menyebabkan jembatan penghubung kedua desa tertutup air dengan arus deras.

### 3.5 Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri)

Desa Tegalsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali yang memiliki luas 199,83 ha. Desa ini memiliki letak strategis karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sehingga sering disebut sebagai pintu masuk Kabupaten Boyolali. Desa Tegalsari memiliki berbagai potensi, salah satunya yakni potensi pariwisata yang menarik, baik dari segi alam, budaya, maupun ekonomi kreatif. Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 556/186 Tahun 2023, Desa Tegalsari resmi ditetapkan sebagai Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri) dengan kategori rintisan. Salah satu daya tarik utama desa ini adalah wisata alam, seperti *river tubing* yang menawarkan pengalaman menyusuri aliran sungai dengan menggunakan ban, serta area persawahan Gunung Mojo yang menyajikan pemandangan hijau yang asri dan menenangkan. Berdasarkan Jaringan Desa Wisata (Jadesta), Desa Wisata Tegalsari juga menawarkan wisata budaya berupa penampilan tarian tradisional Jaran Kepang, Rodat, serta permainan drum blek.

Selain memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya, Desa Wisata Tegalsari juga menawarkan potensi sebagai destinasi edukasi ekonomi kreatif. Potensi ini didukung oleh berbagai usaha berbasis masyarakat, seperti budidaya ikan lele, industri pembuatan tahu dan tempe, serta pemanfaatan limbah ban bekas yang diolah menjadi produk bernilai guna. Berdasarkan data Jadesta, fasilitas yang tersedia di Desa Wisata Tegalsari sudah cukup lengkap, mencakup area outbond, restoran atau kafe, kamar mandi, area parkir, hingga penginapan atau homestay. Keberadaan fasilitas ini mendukung kenyamanan wisatawan yang berkunjung, baik untuk menikmati keindahan alam maupun mengikuti kegiatan edukatif. Dengan kombinasi potensi wisata alam, budaya, serta ekonomi kreatif, Desa Wisata Tegalsari memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, desa ini juga dapat menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat, di mana potensi lokal dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

**BAB IV**  
**REKOMENDASI KEBIJAKAN**  
**RDTR KECAMATAN KARANGGEDE**

**4.1 Rekomendasi terkait Kebakaran Pasar Karanggede**

**1) Relokasi Sementara dengan Membuat Pasar Darurat**

Pembuatan pasar darurat dilakukan sebagai solusi sementara untuk menampung pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Karanggede. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para dagang tetap memiliki tempat berjualan sehingga roda perekonomian dapat terus berjalan. Dengan adanya pasar darurat, pedagang tidak mengalami kerugian lebih besar akibat kehilangan tempat usaha dan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan sehari-hari tanpa hambatan. Pasar darurat ini sebaiknya dibangun di lokasi yang mudah dijangkau oleh pedagang dan pembeli, seperti di lahan kosong milik pemerintah atau area dekat pasar lama. Fasilitas dasar seperti tenda atau bangunan semi permanen, penerangan, sistem drainase, serta akses air bersih harus disediakan agar aktivitas perdagangan tetap nyaman dan aman. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengatur sistem zonasi di pasar darurat agar tetap tertata dengan baik dan tidak menimbulkan kemacetan atau ketidakteraturan.

Selain menyediakan tempat usaha, pemerintah juga dapat memberikan bantuan seperti keringanan biaya sewa lapak sementara, bantuan modal usaha, serta pendampingan bagi pedagang untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Dengan kebijakan ini, diharapkan para pedagang dapat bangkit kembali setelah musibah kebakaran sehingga ketika pasar utama selesai direvitalisasi, mereka dapat kembali berdagang.

**2) Pemberian Bantuan Pinjaman UMKM kepada Korban Kebakaran**

Sebagai langkah pemulihan ekonomi bagi pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Karanggede, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pinjaman UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Bantuan ini bertujuan untuk membantu pedagang yang kehilangan kios dan barang dagangan agar segera bangkit dan melanjutkan usahanya. Dengan adanya pinjaman UMKM, pedagang dapat membeli kembali stok barang dagangan, menyewa tempat sementara, atau membangun kembali kios mereka setelah pasar selesai direvitalisasi. Pinjaman dana dapat diberikan dengan skema bunga rendah atau tanpa bunga agar tidak membebani pedagang yang sedang dalam masa pemulihan. Selain itu, proses pengajuan pinjaman harus dibuat mudah dan cepat dengan persyaratan yang tidak terlalu memberatkan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan bank daerah atau lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan pinjaman ini secara lebih efektif. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para

pedagang dapat segera kembali berjualan sehingga aktivitas ekonomi di Pasar Karanggede dapat pulih dengan cepat.

### 3) **Revitalisasi Pasar**

Kebakaran yang melanda Pasar Karanggede menyebabkan kerusakan pada kios dan los pedagang sehingga diperlukan langkah revitalisasi untuk memulihkan fungsi pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat. Revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali bangunan pasar yang rusak, tetapi juga pada peningkatan infrastruktur dan sistem keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Revitalisasi pasar dapat mencakup perbaikan tata letak kios dan los agar lebih tertata, penggunaan bahan bangunan yang lebih tahan api, serta pengadaan fasilitas pendukung seperti sistem pemadam kebakaran otomatis, jalur evakuasi yang lebih aman dan instalasi listrik yang sesuai dengan standar keamanan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kenyamanan pengunjung dengan menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti tempat parkir yang luas, area pejalan kaki yang aman, serta sistem drainase yang baik.

Revitalisasi yang dilakukan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat mencakup aspek manajerial dengan meningkatkan pengelolaan sistem pasar, seperti penerapan pembayaran non-tunai dan sistem pencatatan digital bagi pedagang. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing pasar. Pemerintah juga dapat melibatkan partisipasi pedagang dalam perencanaan revitalisasi agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya revitalisasi, Pasar Karanggede diharapkan dapat kembali menjadi pusat perdagangan yang aman dan nyaman. Revitalisasi ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan daya tarik pasar sehingga lebih kompetitif dan mampu menarik lebih banyak pembeli dari berbagai daerah.

## 4.2 **Rekomendasi terkait di Desa Sendang**

### 1) **Optimalisasi Infrastruktur dan Operasional TPST**

Kebijakan yang dapat dilakukan yakni dengan peningkatan infrastruktur dan operasional yang memadai. Salah satunya dengan memastikan bahwa mesin dan peralatan pengolahan sampah, seperti *conveyor*, mesin pencacah, dan pengayak selalu dalam kondisi baik melalui pemeliharaan rutin. Perawatan berkala ini bertujuan untuk menghindari kerusakan yang dapat menghambat proses pengolahan sampah dan mengurangi efektivitas kerja TPST. Selain pemeliharaan alat yang sudah ada, perlu dilakukan pengadaan alat tambahan yang dapat mendukung kinerja TPST. Contohnya seperti pengadaan kendaraan angkut roda tiga untuk mempermudah proses pengumpulan sampah dari masyarakat ke TPST. Selain itu, perlu ada penambahan peralatan dan perlengkapan komposting, seperti wadah kompos, mesin pencacah organik, dan bak

fermentasi agar pengolahan sampah organik dapat berjalan lebih baik dan menghasilkan kompos berkualitas. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas TPST juga harus diperhatikan dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD), seperti sarung tangan, masker, sepatu bot, dan pakaian kerja khusus. APD ini penting untuk melindungi pekerja dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan langsung terhadap sampah.

## **2) Optimalisasi Anggaran untuk TPST**

Optimalisasi infrastruktur juga harus didukung dengan anggaran khusus untuk operasional TPST. Anggaran mencakup biaya peralatan alat, pembelian bahan tambahan untuk proses komposting, serta biaya transportasi sampah dari titik pengumpulan ke TPST. Selain itu, dana juga diperlukan untuk gaji tenaga kerja yang bertugas dalam pengelolaan sampah, termasuk petugas pemilah, operator mesin, serta tenaga administrasi. Untuk memastikan operasional TPST, pemerintah desa dan kecamatan dapat mengalokasikan dana dari anggaran desa. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta dan LSM lingkungan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan tambahan, terutama dalam bentuk hibah alat, pelatihan tenaga kerja, serta program pendampingan teknis dalam pengolahan sampah.

Di sisi lain, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan secara khusus untuk perbaikan fisik bangunan TPST, seperti perbaikan atap, lantai, sistem drainase agar fasilitas ini lebih layak dan aman digunakan. Dengan pendanaan dari berbagai sumber, diharapkan TPST di Desa Sendang dapat berfungsi lebih optimal dalam mengelola sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat bagi masyarakat.

## **3) Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan TPST**

Dalam rangka menjalankan kembali kegiatan TPST Desa Sendang, maka diperlukan penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab atas operasional dan keberlanjutan fasilitas ini. Kebijakan yang dapat dilakukan yakni membentuk atau mengaktifkan kembali kelompok pengelola TPST. Kelompok pengelola ini dapat terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Selain itu, agar kelembagaan ini dapat berjalan secara efektif, perlu didukung dengan sistem kerja yang jelas, pelatihan bagi anggota, serta adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan pendampingan teknis dan bantuan operasional.

Untuk memastikan keberlanjutan operasional TPST, perlu diterapkan sistem insentif bagi petugas TPST sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Insentif ini dapat berupa honorarium, tunjangan kerja, atau program penghargaan berbasis kinerja. Dengan adanya kelembagaan yang terorganisir, tenaga kerja yang terlatih, serta insentif, TPST Desa Sendang



diharapkan dapat kembali berfungsi secara optimal dalam mengolah sampah dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

#### **4) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah**

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mengaktifkan kembali TPST Desa Sendang. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, serta memahami manfaat dari pengolahan sampah, seperti komposting dan daur ulang. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, penyuluhan di sekolah, maupun kampanye lingkungan berbasis komunitas.

Selain edukasi, pemerintah desa juga perlu mendukung upaya ini dengan menyediakan fasilitas tempat sampah yang memadai bagi warga. Penyediaan tempat sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik di setiap rumah atau titik-titik strategis akan memudahkan proses pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebelum diangkut ke TPST. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai serta kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan TPST Desa Sendang dapat kembali beroperasi secara efektif sehingga mampu mengurangi permasalahan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta sehat bagi seluruh warga.

### **4.3 Rekomendasi terkait Terminal Tipe C Karanggede**

#### **1) Revitalisasi dan Perbaikan Infrastruktur Terminal**

Terminal tipe C di Karanggede masih belum berfungsi dengan optimal karena kondisi terminal yang kurang terawat. Semakin sedikit masyarakat yang menggunakan transportasi umum karena mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan terminal menjadi sepi. Terminal tipe C di Karanggede perlu mendapatkan revitalisasi agar kembali berfungsi dengan baik sebagai pusat transportasi umum. Pemerintah dapat membenahi fasilitas terminal, seperti perbaikan gedung dan penyediaan rambu serta marka jalan yang jelas.

Untuk meningkatkan fungsi dan kenyamanan terminal, maka dapat dilengkapi dengan bangunan kantor yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan pengelolaan operasional terminal. Selain itu, penyediaan fasilitas penumpang yang memadai, seperti tempat tunggu yang nyaman, dilengkapi kursi, atap pelindung dari panas dan hujan. Papan informasi dan rambu petunjuk juga perlu disediakan agar penumpang lebih mudah mengetahui jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan. Selain itu, dapat dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang aman, sarana kesehatan, dan toilet yang bersih dan memadai. Dengan adanya peningkatan fasilitas ini, Terminal Karanggede dapat menjadi lebih fungsional, nyaman, dan

menarik bagi pengguna jasa transportasi umum sehingga mampu menjalankan perannya kembali sebagai pusat mobilitas yang mendukung aktivitas masyarakat di sekitarnya.

## **2) Optimalisasi Manajemen dan Operasional Terminal**

Sebagai upaya agar terminal dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada pengelolaan yang lebih efektif dan terstruktur, seperti penyusunan regulasi operasional yang jelas, pembentukan tim pengelola terminal, serta pengawasan terhadap kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal. Penyusunan regulasi operasional dapat mencakup aturan mengenai jadwal operasional terminal, standar pelayanan bagi pengguna transportasi, serta ketentuan bagi kendaraan umum yang masuk dan keluar terminal. Regulasi ini penting untuk memastikan terminal dapat beroperasi sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas lain yang tidak mendukung fungsi utama terminal.

Pembentukan tim pengelola terminal dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasional terminal. Tim ini dapat terdiri dari pihak pemerintah daerah, operator transportasi, serta tenaga pengelola yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan fasilitas terminal. Dengan adanya tim yang bertanggung jawab, pengelolaan terminal dapat lebih terarah. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar terminal. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pencatatan kendaraan, pemberlakuan tarif retribusi yang transparan, serta sanksi bagi kendaraan yang tidak mengikuti aturan terminal.

## **3) Penegakan Aturan dan Regulasi**

Terminal Tipe C Karanggede saat ini lebih sering digunakan sebagai tempat parkir kendaraan pribadi oleh masyarakat yang hendak ke Pasar Karanggede daripada menjalankan fungsinya sebagai pusat transportasi umum. Hal ini menyebabkan terminal menjadi kurang optimal dengan minimnya aktivitas kendaraan umum, serta terhambatnya mobilitas transportasi yang seharusnya berlangsung di area terminal. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat semakin memperburuk fungsi terminal dan membuatnya tidak lagi berperan sebagai titik utama layanan transportasi di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penegakan aturan dan regulasi terkait penggunaan terminal. Pemerintah daerah perlu mengatur kembali sistem parkir di sekitar terminal, misalnya dengan menyediakan lahan parkir khusus untuk kendaraan pribadi di luar area terminal sehingga terminal tetap dapat digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, pemberlakuan sanksi bagi kendaraan pribadi yang parkir sembarangan di dalam terminal agar ada efek jera bagi pelanggar peraturan. Tidak hanya itu, dapat pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar terminal untuk meningkatkan kesadaran akan fungsi

terminal. Dengan adanya penegakan aturan yang tegas dan didukung dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan terminal Tipe C Karanggede dapat kembali berfungsi dengan optimal.

#### 4.4 Rekomendasi terkait Rawan Bencana Banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol

##### 1) Pemasangan Alat Pemantauan Debit Air Sungai

Salah satu penyebab utama terjadinya banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, adalah luapan air dari Sungai Braholo akibat tingginya curah hujan dalam waktu singkat. Peningkatan debit air yang terjadi secara drastis sering kali membuat sungai tidak mampu menampung aliran air, sehingga meluap dan menggenangi permukiman serta lahan pertanian di sekitarnya. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kurangnya sistem peringatan dini, sehingga masyarakat sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk bersiap menghadapi banjir.

Sebagai upaya mitigasi, pemerintah daerah perlu memasang alat pemantau debit air sungai di beberapa titik strategis sepanjang Sungai Braholo. Alat ini berfungsi untuk memonitor perubahan ketinggian air secara *real-time*, sehingga apabila terjadi peningkatan debit air yang signifikan, sistem dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak berwenang. Dengan adanya peringatan ini, masyarakat dapat segera mengambil langkah antisipatif, seperti mengamankan barang berharga dan bersiap untuk evakuasi jika diperlukan. Informasi mengenai peningkatan debit air juga dapat diintegrasikan dengan sistem peringatan berbasis digital, seperti notifikasi melalui SMS atau aplikasi cuaca, agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

##### 2) Pembangunan dan Perbaikan Sistem Drainase

Selain meluapnya air Sungai Braholo, salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, adalah sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi saat hujan deras. Selokan yang ada di kedua desa tersebut memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga ketika curah hujan tinggi, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke jalanan, permukiman, serta lahan pertanian. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan sistem drainase menjadi langkah utama dalam mitigasi bencana banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol. Sistem drainase yang baik akan membantu mempercepat aliran air hujan ke tempat pembuangan yang lebih aman, sehingga dapat mengurangi genangan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti pengerukan dan pelebaran saluran drainase untuk memastikan aliran air tetap lancar, serta pembuatan sistem drainase yang lebih dalam dan luas

agar mampu menampung volume air yang lebih besar saat curah hujan tinggi. Selain itu, pembangunan sumur resapan dan biopori juga menjadi solusi efektif untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga dapat mengurangi potensi genangan yang berujung pada banjir. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur drainase yang ada, memastikan setiap saluran air berfungsi dengan optimal, serta melakukan evaluasi terhadap sistem drainase yang masih kurang efektif agar dapat ditingkatkan. Dengan adanya upaya ini diharapkan banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede dapat dihindari maupun diatasi dengan baik.

### **3) Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana bagi Masyarakat**

Kesiapan masyarakat yang masih rendah dalam menghadapi bencana banjir menjadi salah satu tantangan dalam upaya mitigasi di Desa Mojosari dan Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Banyak warga yang belum memahami langkah-langkah antisipasi dan penanganan yang tepat ketika banjir terjadi, sehingga sering kali mereka tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk melindungi diri dan harta benda mereka. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai tanda-tanda awal bencana dan prosedur evakuasi juga meningkatkan risiko keselamatan saat banjir melanda. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai mitigasi banjir perlu dilakukan secara intensif kepada masyarakat, agar mereka lebih sadar dan siap menghadapi bencana. Sosialisasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengenalan penyebab banjir, cara membaca peringatan dini, prosedur evakuasi yang aman, serta langkah-langkah perlindungan diri dan barang berharga. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengadakan pelatihan simulasi evakuasi secara berkala, sehingga masyarakat dapat memahami tindakan yang harus dilakukan saat menghadapi situasi darurat.

## **4.5 Rekomendasi terkait Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri)**

### **1) Pengembangan Pariwisata berbasis Potensi Lokal**

Daya tarik utama di Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri) adalah wisata river tubing dan area persawahan Gunung Mojo. Namun, kedua destinasi ini masih belum dikembangkan secara optimal untuk menarik lebih banyak wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan yang terencana agar potensi wisata di desa ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan area persawahan Gunung Mojo sebagai destinasi agrowisata edukatif. Konsep yang dapat diterapkan adalah wisata edukasi penanaman padi, di mana wisatawan, terutama anak-anak dan pelajar, dapat belajar langsung mengenai proses bercocok tanam, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga panen. Selain itu, keindahan persawahan Gunung Mojo juga dapat dinikmati dari ketinggian, menjadikannya lokasi yang sangat potensial

untuk pembangunan gardu pandang. Kehadiran gardu pandang ini tidak hanya menambah daya tarik wisata, tetapi juga menjadi spot foto yang menarik bagi pengunjung.

Selain kedua wisata unggulan tersebut, masih terdapat beberapa potensi wisata di Desa Wisata Tegalsari yang belum dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah, khususnya wisata alam Embung Tegalsari dan Goa Pendem. Kedua destinasi ini memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan jika dikembangkan dengan konsep yang menarik dan berkelanjutan. Pengembangan Embung Tegalsari dapat dilakukan dengan merancang area komunal (communal area) dan taman di sekitar embung. Ruang publik ini dapat dimanfaatkan oleh wisatawan maupun masyarakat setempat untuk beraktivitas, bersantai, serta menikmati keindahan alam sekitar. Selain itu, fasilitas tambahan seperti jalur pejalan kaki, gazebo, dan area rekreasi keluarga dapat semakin meningkatkan daya tarik embung sebagai destinasi wisata. Sementara itu, pengembangan Wisata Goa Pendem dapat dilakukan melalui konsep wisata susur goa, yang memungkinkan wisatawan mengeksplorasi keindahan serta keunikan formasi alami di dalam goa. Dengan konsep ini, Goa Pendem tidak hanya menjadi tempat wisata alam yang menarik, tetapi juga dapat menjadi destinasi edukatif bagi pengunjung yang ingin mempelajari ekosistem bawah tanah dan sejarah terbentuknya goa.

Potensi ekonomi kreatif di Desa Wisata Tegalsari juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi wisata edukatif yang menarik minat wisatawan. Konsep wisata ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan pengalaman langsung bagi wisatawan dalam memahami proses produksi berbagai UMKM yang berkembang di desa tersebut. Salah satu bentuk implementasi wisata edukatif ini adalah dengan mengajak wisatawan melihat secara langsung proses pembuatan tahu dan tempe, mulai dari tahap pengolahan kedelai hingga produk siap konsumsi. Selain itu, wisatawan juga dapat mengikuti edukasi tentang pengembangan ternak lele, termasuk cara pemijahan, perawatan, hingga panen ikan lele. Melalui konsep ini, wisatawan tidak hanya menikmati pengalaman wisata yang unik, tetapi juga memperoleh wawasan baru tentang industri lokal serta pentingnya ekonomi kreatif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

## **2) Mengembangkan paket wisata terpadu yang menggabungkan wisata alam, budaya, dan edukasi ekonomi kreatif.**

Salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah penyediaan paket wisata yang menarik dan terintegrasi. Paket wisata memungkinkan wisatawan untuk menikmati berbagai pengalaman dalam satu kunjungan, sehingga tidak hanya meningkatkan daya tarik destinasi tetapi juga memperpanjang durasi kunjungan serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dalam hal ini paket wisata di

Desa Wisata Tegalsari dapat dikembangkan dengan mengusung konsep taman wisata edukasi, yang menggabungkan berbagai aktivitas berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Konsep ini memberikan pengalaman menyeluruh bagi wisatawan dengan memadukan petualangan, edukasi, serta interaksi langsung dengan kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya paket wisata yang terstruktur dan beragam, wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang lebih menarik, bervariasi, dan berkesan. Selain itu, paket wisata ini juga dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif, menarik lebih banyak wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa melalui peningkatan keterlibatan mereka dalam sektor pariwisata.

### **3) Meningkatkan promosi digital melalui media sosial**

Pengembangan pariwisata yang efektif dapat dilakukan dengan peningkatan promosi digital melalui media sosial. Pemanfaatan platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube menjadi strategi yang penting untuk memperkenalkan daya tarik wisata secara lebih luas dan menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pembuatan konten visual yang menarik, seperti foto dan video yang menampilkan keindahan alam, aktivitas wisata, serta budaya lokal. Selain media sosial, pembuatan website resmi atau marketplace wisata juga sangat penting. Website ini dapat menyediakan informasi lengkap mengenai destinasi wisata, harga paket wisata, fasilitas yang tersedia, serta sistem pemesanan yang mudah diakses. Platform digital yang informatif dan mudah dijangkau akan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata Tegalsari. Dengan adanya strategi promosi digital yang optimal, Desa Wisata Tegalsari tidak hanya dapat meningkatkan visibilitasnya tetapi juga menarik lebih banyak wisatawan sehingga sektor pariwisata desa dapat berkembang lebih pesat serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, isu dan permasalahan strategis kawasan terkait tata ruang di Kecamatan Karanggede adalah sebagai berikut:

1. Pasar Karanggede yang merupakan satu-satunya pasar umum di Kecamatan Karanggede mengalami kebakaran pada hari Minggu, 3 November 2024. Kebakaran tersebut menghanguskan sebagian besar kios dan los pedagang, termasuk kantor UPT Pasar di lantai 2. Kebakaran Pasar Karanggede berdampak pada area seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> dan mengakibatkan kerugian material lebih dari Rp5 miliar.
2. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Desa Sendang belum berfungsi secara optimal karena tidak terdapat aktivitas pengumpulan maupun pengolahan sampah. Ketidakaktifan TPST Sendang menunjukkan bahwa kelembagaan yang mengelola operasional tidak berjalan dengan baik. Selain itu aspek pembiayaan dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipastikan akibat tidak berjalannya sistem yang ada. Meskipun begitu, TPST dilengkapi berbagai mesin pengolah sampah dan bak penyimpanan dalam kondisi yang baik.
3. Terminal Tipe C tidak berfungsi dengan baik karena mengalami permasalahan dalam operasionalnya serta kondisi terminal yang kurang terawat dengan fasilitas yang tidak mendapatkan pemeliharaan secara optimal. Meskipun lokasinya strategis dekat dengan Pasar Karanggede, terminal ini minim aktivitas transportasi umum dan lebih sering digunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi. Kondisi ini dapat menghambat perannya dalam mendukung sistem transportasi dan distribusi barang di Kecamatan Karanggede.
4. Desa Mojosari dan Desa Pengkol termasuk wilayah yang memiliki risiko banjir kelas tinggi. Kedua desa ini memiliki topografi yang mencekung dengan sistem drainase serta serapan air yang kurang memadai. Pada tahun 2021, kedua desa ini mengalami banjir bandang akibat meluapnya Sungai Braholo setelah hujan deras. Banjir merusak rumah warga, lahan pertanian, serta menutup akses jembatan penghubung kedua desa.
5. Desa Tegalsari ditetapkan sebagai Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri) dengan kategori rintisan. Dewi Sri memiliki daya tarik berupa *river tubing*, pemandangan persawahan gunung Mojo, serta kesenian tradisional, seperti jaran kepang dan rodan. Selain itu, terdapat destinasi edukasi ekonomi kreatif berupa budidaya ikan lele dan pengolahan limbah ban bekas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan isu dan permasalahan strategis kawasan terkait tata ruang di Kecamatan Karanggede berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan:

1. Rekomendasi terkait kebakaran Pasar Karanggede
  - Relokasi Sementara dengan Membuat Pasar Darurat
  - Pemberian Bantuan Pinjaman UMKM kepada Korban Kebakaran
  - Revitalisasi Pasar
2. Rekomendasi terkait TPST di Desa Sendang
  - Optimalisasi Infrastruktur dan Operasional TPST
  - Optimalisasi Anggaran untuk TPST
  - Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan TPST
  - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
3. Rekomendasi terkait Terminal Tipe C Karanggede
  - Revitalisasi dan Perbaikan Infrastruktur Terminal
  - Optimalisasi Manajemen dan Operasional Terminal
  - Penegakan Aturan dan Regulasi
4. Rekomendasi terkait rawan banjir di Desa Mojosari dan Desa Pengkol
  - Pemasangan Alat Pemantauan Debit Air Sungai
  - Pembangunan dan Perbaikan Sistem Drainase
  - Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana bagi Masyarakat
5. Rekomendasi terkait Desa Wisata Tegalsari (Dewi Sri)
  - Pengembangan Pariwisata berbasis Potensi Lokal
  - Mengembangkan paket wisata terpadu yang menggabungkan wisata alam, budaya, dan edukasi ekonomi kreatif
  - Meningkatkan promosi digital melalui media sosial



## DAFTAR PUSTAKA

- Endasmoro, T. K., & Akliyah, L. S. (2023). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Cianjur. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 39-46.
- Hamid, N. V. (2023). Kesesuaian Realisasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Indikasi Program dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Mbay. Desa-Kota: *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(2), 28-37.
- Haurissa, D., Rondonuwu, D. M., & Tilaar, S. (2019). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke. *Spasial*, 6(3), 646-657.
- Mokodongan, R. P., Rondonuwu, D. M., & Moniaga, I. L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034. *SPASIAL*, 6(1), 68-77.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
- Pratama, M. A., Wirawan, B., Maria, D., Santoso, S. I., & Bidari, G. S. A. (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR): semua bisa paham, semua bisa ikut serta*. Penerbit Andi.
- Wahid, Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media.